

INTEGRASI MAQASHID SYARIAH TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRATIS DAN OTORITER DI NEGARA BARU MERDEKA

Arif Sugitanata,¹, Ahmad Mustakim,² L. Hendri Nuriskandar,³ Elpipit,⁴

¹ Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ), Wonosobo, Indonesia

² Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam, Nganjuk, Indonesia

³ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussalam,, Indonesia

⁴ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussalam , Indonesia

Email Koresponden: arifsugitanata@gmail.com

Email: am4572316@gmail.com

Abstract

This research aims to identify the effectiveness of democratic and authoritarian systems of government in the context of newly independent states, using Maqashid Shariah theory as an analytical framework. Through a desk study and qualitative research, this research explores how the two systems support or hinder the process of national development, political stability, and the achievement of social and economic progress. The results show that democracy offers freedom, active participation of the people, and social justice that are in line with the principles of Maqashid Sharia. However, it also requires solid institutions and mature political awareness. On the other hand, authoritarian systems offer stability and security, but often at the expense of individual freedom and social justice in the long run. This research suggests that transitioning to democracy or integrating elements of both systems in a hybrid model can be a strategy to achieve a balance between stability and freedom, as well as inclusive and sustainable economic growth. In conclusion, in choosing and implementing a system of government, newly independent countries should pay attention to how the system can support the achievement of Maqashid Shariah's objectives, including the balance between government power and individual freedom, as well as promoting sustainable economic growth and social stability.

Keywords: *Maqashid Sharia, Government System, Democratic, Authoritarian*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas sistem pemerintahan demokratis dan otoriter dalam konteks negara yang baru merdeka, dengan menggunakan teori Maqashid Syariah sebagai kerangka analisis. Melalui studi kepustakaan dengan jenis penelitian kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kedua sistem tersebut mendukung atau menghambat proses pembangunan nasional, stabilitas politik, serta pencapaian kemajuan sosial dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi menawarkan kebebasan, partisipasi aktif masyarakat, dan keadilan sosial yang sejalan dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah, namun, juga memerlukan institusi yang kuat dan kesadaran politik yang matang. Di sisi lain, sistem otoriter menawarkan stabilitas dan keamanan, namun sering kali mengorbankan kebebasan individu dan keadilan sosial dalam jangka panjang. Penelitian ini menyarankan bahwa transisi ke demokrasi atau pengintegrasian elemen dari kedua sistem dalam model hibrida dapat menjadi strategi untuk mencapai keseimbangan antara stabilitas dan kebebasan, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kesimpulannya, dalam memilih

dan mengimplementasikan sistem pemerintahan, negara-negara baru merdeka harus memperhatikan bagaimana sistem tersebut dapat mendukung pencapaian tujuan-tujuan Maqashid Syariah, termasuk keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan kebebasan individu, serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Sistem Pemerintahan, Demokratis, Otoriter

Article history:	STIS Darussalam Bermi
Received : 07/07/2023	https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/juridar
Approved : 21/08/2023	

Pendahuluan

Memilih sistem pemerintahan yang tepat merupakan salah satu keputusan kritis yang dapat menentukan arah dan keberhasilan suatu negara dalam membangun stabilitas politik, kemakmuran ekonomi, dan kesejahteraan sosial.¹ Terdapat berbagai sistem pemerintahan yang dapat diterapkan oleh sebuah negara, di antaranya adalah sistem demokratis dan sistem otoriter.² Sistem demokratis menekankan pada prinsip kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan mereka memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin serta berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan.³ Di sisi lain, sistem otoriter dikarakteristikan oleh konsentrasi kekuasaan pada individu atau kelompok kecil yang tidak jarang melegitimasi kekuasaannya melalui kekuatan militer atau dukungan elit politik.⁴

Penelitian terdahulu telah mengidentifikasi bagaimana dalam suatu negara menganut salah satu dari sistem demokratis dan otoriter, seperti di Indonesia, yang menganut sistem demokratis bukan negara kekuasaan otoriter.⁵ Selain itu, Keterlibatan warga dalam kegiatan politik di negara-negara demokrasi, seperti Indonesia, berbeda secara signifikan dari keterlibatan mereka di negara-negara otoriter. Dalam konteks demokrasi, partai politik memainkan peran penting dalam menyosialisasikan isu-isu politik, mendorong partisipasi masyarakat, mengakomodasi proses rekrutmen politik, dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini mencerminkan komitmen partai-partai tersebut dalam menjalankan perannya sebagai pilar penting infrastruktur politik. Sebaliknya, di negara-negara otoriter, seperti Korea Utara, keberadaan partai politik sangat terbatas, biasanya hanya satu, yang berfungsi sebagai pendukung utama rezim yang berkuasa. Dalam konteks ini, partai politik lebih berperan sebagai instrumen penguasa daripada sebagai wadah partisipasi publik dalam proses politik.⁶ Lebih lanjut, penelitian lain juga mengungkapkan pentingnya demokratisasi dalam konteks politik global, terutama setelah berakhirnya Perang Dingin. Ia menekankan bahwa demokratisasi dianggap sebagai kunci untuk menjamin hak-hak sipil, serta mendukung keamanan dan perdamaian internasional. Meskipun demikian, masih ada banyak

¹ Eko Prasetyo and Arif Sugitanata, "Urgensi Penerapan Good Governance Berbasis Kearifan Lokal Di Indonesia," *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2022): 67–90.

² Robert M Marsh, "Authoritarian and Democratic Transitions in National Political Systems," *International Journal of Comparative Sociology* 32, no. 3 (1991): 219.

³ Syaiful Asmi Hasibuan, "Sistem Pemilihan Umum Dalam Kaitan Dengan Negara Demokrasi," *Warta Dharmawangsa* 17, no. 2 (2023): 602–9.

⁴ Milan W Svobik, "Power Sharing and Leadership Dynamics in Authoritarian Regimes," *American Journal of Political Science* 53, no. 2 (2009): 477–94.

⁵ A Salman Maggalatung, "Indonesia Negara Hukum Demokratis Bukan Negara Kekuasaan Otoriter," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 2, no. 2 (2015): 209–20.

⁶ Dina Fadiyah and Antonius Jeremias Beso, "Perbandingan Partisipasi Politik Di Negara Demokrasi Dan Negara Otoriter," *JURNAL POLINTER: KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL* 4, no. 1 (2018): 37–42.

negara yang berada di bawah sistem otoriter yang tidak menjamin hak-hak tersebut, namun politik di negara-negara itu tampak stabil.⁷

Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan di atas, dalam penelitian ini memiliki pergeseran fokus, di mana, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan membandingkan efektivitas kedua sistem pemerintahan tersebut dalam konteks negara yang baru merdeka, dengan fokus pada bagaimana masing-masing sistem dapat mendukung atau menghambat proses pembangunan nasional, stabilitas politik, serta pencapaian kemajuan sosial dan ekonomi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengintegrasikan teori Maqashid Syariah sebagai pisau analisis dalam mengevaluasi efektivitas kedua sistem pemerintahan tersebut. Dengan menerapkan teori Maqashid Syariah sebagai kerangka kerja analitis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih dalam tentang bagaimana sistem pemerintahan dapat diarahkan untuk tidak hanya mencapai stabilitas politik dan kemajuan ekonomi, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan. Melalui teori ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih luas tentang kriteria dan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih sistem pemerintahan yang paling sesuai bagi negara-negara yang baru. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan insight dan rekomendasi yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi pembangunan dan pemerintahan yang inklusif dan berkelanjutan bagi negara yang baru merdeka.

Metode Penelitian

Penelitian ini dijalankan sebagai sebuah studi kepustakaan yang mengadopsi jenis penelitian kualitatif. Data primer yang digunakan berasal dari buku dan jurnal-jurnal yang relevan dengan pokok masalah penelitian, yaitu mengenai sistem pemerintahan yang efektif pada negara yang baru merdeka, dan apakah sistem demokratis atau otoriter.? Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif analitis, yang memberikan pemahaman mendalam tentang karakteristik dan dinamika sistem pemerintahan yang diamati. Hal ini diperkuat oleh kerangka teori maqashid syariah, yang berfungsi sebagai alat analisis yang terstruktur dan terfokus.

Hasil dan Pembahasan

Menavigasi Tantangan dan Peluang di Era Pasca-Kemerdekaan

Proses menuju kemerdekaan sering kali dipenuhi dengan perjuangan dan pengorbanan yang tak terukur.⁸ Setelah kemerdekaan, negara tersebut dihadapkan pada tantangan besar dalam membangun fondasi pemerintahan yang kuat dan efektif. Situasi pemerintahan pada negara yang baru merdeka dapat digambarkan dalam beberapa fase penting, yang mencakup pembentukan struktur pemerintahan, penanganan masalah internal, dan penstabilan hubungan internasional.⁹ Pada awal kemerdekaan, salah satu langkah pertama yang harus diambil adalah pembentukan struktur pemerintahan. Negara tersebut perlu menentukan bentuk pemerintahan

⁷ Mohamad Rosyidin, "Dari Otoritarianisme Ke Demokrasi: Bagaimana Mendorong Negara Menuju Kestabilan Dan Keterbukaan?," *Jurnal Penelitian Politik* Volume 10, no. 1 (2013): 155–60.

⁸ Ahmad Royani, "Pesantren Dalam Bingkai Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia," *Jurnal Islam Nusantara* 2, no. 1 (2020): 121–28.

⁹ Muhammad Basri et al., "Penjajahan Barat Atas Dunia Islam Dan Perjuangan Kemerdekaan Negara-Negara Islam," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2024): 19–24.

yang akan diadopsi yang sesuai dengan kondisi dan aspirasi rakyatnya. Proses ini sering kali melibatkan pembuatan konstitusi baru yang akan menjadi landasan hukum negara. Pembentukan lembaga-lembaga pemerintahan dan pemilihan pejabat publik juga menjadi prioritas untuk memastikan bahwa pemerintahan dapat berjalan secara efektif.¹⁰

Selain itu, negara yang baru merdeka juga menghadapi tantangan dalam menangani masalah internal. Hal ini termasuk membangun ekonomi yang stabil, mengatasi perbedaan etnis dan sosial, serta memperbaiki infrastruktur yang mungkin rusak akibat konflik.¹¹ Pembangunan ekonomi adalah salah satu aspek kritis yang memerlukan perhatian khusus, karena kesejahteraan rakyat dan stabilitas negara sangat bergantung pada keberhasilan dalam aspek ini. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi dan pengembangan bisnis.¹²

Pada saat yang sama, membangun hubungan internasional yang baik merupakan aspek penting lainnya. Negara yang baru merdeka harus mampu menavigasi kancah politik global dan menegosiasikan posisinya di antara negara-negara lain. Hal ini melibatkan partisipasi dalam organisasi internasional, menjalin aliansi, dan membangun hubungan diplomatik yang kuat.¹³ Hubungan internasional yang positif tidak hanya penting untuk mendapatkan dukungan dalam pembangunan nasional tetapi juga untuk memastikan keamanan dan kedaulatan negara.¹⁴

Lebih lanjut, dalam menapaki jalan paska kemerdekaan, sebuah negara juga dihadapkan pada tantangan memperkuat identitas nasional dan mempromosikan integrasi sosial di antara beragam kelompok masyarakatnya.¹⁵ Mengingat bahwa negara-negara yang baru merdeka sering kali memiliki keanekaragaman etnis, budaya, dan bahasa yang luas, mendorong rasa persatuan dan kesatuan menjadi prioritas utama.¹⁶ Pemerintah harus mengembangkan strategi yang inklusif untuk memastikan bahwa semua kelompok merasa terwakili dan dihargai dalam proses pembangunan bangsa. Ini termasuk pendidikan tentang nilai-nilai nasional, perayaan kebudayaan bersama, dan kebijakan yang mendukung kesetaraan dan keadilan sosial.

Penguatan sistem hukum dan penegakan hukum juga menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan keadilan di negara yang baru merdeka. Penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi-institusi negara.¹⁷ Hal ini juga penting untuk melindungi hak asasi manusia dan

¹⁰ Georges M Abi-Saab, "The Newly Independent States and the Rules of International Law: An Outline," *Howard LJ* 8, no. 1 (1962): 95.

¹¹ Ioannis Armakolas et al., "State-Building in Post-Independence Kosovo: Policy Challenges and Societal Considerations," Ioannis Armakolas, Agon Demjaha, Arolda Elbasani, Stephanie Schwandner-Sievers, Elton Skendaj and Nikolaos Tzifakis (2017). (Eds), *State-Building in Post-Independence Kosovo: Policy Challenges and Societal Considerations*, Pristina: Kosovo Foundation for Open Society, 2017, 423.

¹² Joseph Stiglitz et al., *Stability with Growth: Macroeconomics, Liberalization and Development* (New York: OUP Oxford, 2006), 37–233.

¹³ Irvan Tasnur and Muhammad Rijal Fadli, "Republik Indonesia Serikat: Tinjauan Historis Hubungan Kausalitas Peristiwa-Peristiwa Pasca Kemerdekaan Terhadap Pembentukan Negara RIS (1945-1949)," *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah* 5, no. 2 (2019): 58–67.

¹⁴ Gunawan Santoso, Aim Abdul Karim, and Bunyamin Maftuh, "Kajian Ketahanan Nasional Melalui Geopolitik Dan Geostrategi Indonesia Abad 21," *Jurnal Pendidikan Transformatif* 2, no. 1 (2023): 21.

¹⁵ Montserrat Guibernau, "National Identity, Devolution and Secession in Canada, Britain and Spain," *Nations and Nationalism* 12, no. 1 (2006): 51–76.

¹⁶ Heri Susanto, "Kolonialisme Dan Identitas Kebangsaan Negara-Negara Asia Tenggara," *Jurnal Sejarah Dan Budaya* 10, no. 2 (2016): 144–55.

¹⁷ Sanele Sibanda, "Not Purpose-Made! Transformative Constitutionalism, Post-Independence Constitutionalism and the Struggle to Eradicate Poverty," *Stellenbosch Law Review* 22, no. 3 (2011): 482–500.

kebebasan sipil yang menjadi dasar dari demokrasi yang sehat. Pembentukan lembaga-lembaga pengawas yang independen dan media yang bebas dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.¹⁸ Selain itu, mengatasi tantangan keamanan domestik dan eksternal merupakan bagian integral dari konsolidasi negara pasca-kemerdekaan. Ancaman separatistis, konflik internal, dan intervensi asing dapat menggoyahkan stabilitas nasional. Pemerintah harus bekerja untuk memperkuat kapasitas pertahanan dan keamanan negara, sambil memastikan bahwa pendekatan yang diambil tidak merugikan hak-hak masyarakat sipil.¹⁹ Diplomasi dan dialog sering kali merupakan alat yang paling efektif dalam menyelesaikan konflik dan membangun perdamaian.

Akhirnya, pembangunan infrastruktur dan layanan publik adalah elemen penting lainnya dalam membangun negara yang baru merdeka. Akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, air bersih, dan sanitasi merupakan hak dasar yang harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat. Pembangunan infrastruktur transportasi, komunikasi, dan energi juga kritis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan integrasi nasional. Investasi dalam infrastruktur ini membutuhkan perencanaan yang matang dan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas internasional.²⁰ Perjalanan sebuah negara pasca-kemerdekaan adalah proses yang kompleks dan dinamis, dipenuhi dengan peluang dan tantangan. Melalui kerja keras, dedikasi, dan semangat kolaboratif, sebuah negara dapat meletakkan dasar-dasar untuk masa depan yang makmur dan harmonis. Langkah-langkah yang diambil dalam tahun-tahun awal kemerdekaan akan menentukan arah pembangunan negara dan kesejahteraan rakyatnya untuk generasi yang akan datang.

Demokrasi vs Otoriter: Menimbang Pilihan Sistem Pemerintahan bagi Negara Baru Merdeka

Sistem pemerintahan merupakan sebuah aspek krusial dalam menentukan arah dan stabilitas sebuah negara,²¹ terutama bagi negara-negara yang baru merdeka. Dua model pemerintahan yang sering menjadi pilihan adalah demokrasi dan otoriter.²² Kedua sistem ini menawarkan pendekatan yang berbeda dalam pengelolaan kekuasaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.

Demokrasi, dengan prinsip utamanya yang menekankan pada kebebasan dan partisipasi aktif warganya dalam proses pengambilan keputusan, sering dianggap sebagai sistem ideal pasca-kemerdekaan.²³ Ini karena demokrasi memberikan ruang bagi ekspresi dan aspirasi beragam kelompok dalam masyarakat, sehingga dapat memperkuat fondasi kebersamaan dan kesatuan di tengah keberagaman.²⁴ Melalui pemilihan umum, masyarakat memiliki kekuatan

¹⁸ Elvia Puspa Dewi, "Good Governance Dan Transparansi Rencana Strategi Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah," *Jurnal Lentera Bisnis* 7, no. 2 (2018): 81–108.

¹⁹ Selver B Sahin, "Timor-Leste's Foreign Policy: Securing State Identity in the Post-Independence Period," *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 33, no. 2 (2014): 3–25.

²⁰ Badmus Bidemi Gafar, "The Travail of Service Delivery and Developmental Failure in Post-Independence Nigeria," *Journal of Public Administration and Policy Research* 9, no. 3 (2017): 26–33.

²¹ OJ Ukadike and RO Arisi, "Good Governance: A Panacea for Peace and Stability in Nigeria Nation," *Public Policy and Administration Research* 3, no. 4 (2013): 121.

²² James Cotton, "From Authoritarianism to Democracy in South Korea," *Political Studies* 37, no. 2 (1989): 244–59.

²³ John Mukum Mbaku, "Post-Independence Opportunism and Democratization in Africa," *The Journal of Social, Political, and Economic Studies* 20, no. 4 (1995): 405.

²⁴ Peter Arthur, "Democratic Consolidation in Ghana: The Role and Contribution of the Media, Civil Society and State Institutions," *Commonwealth & Comparative Politics* 48, no. 2 (2010): 203–26.

untuk memilih pemimpin mereka, yang secara teori, harus mewakili kepentingan rakyat dan bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil.²⁵

Di sisi lain, sistem pemerintahan otoriter menawarkan efisiensi dan stabilitas melalui kontrol yang kuat atas negara. Dalam model ini, kekuasaan terpusat pada individu atau kelompok kecil, dengan sedikit atau tanpa partisipasi langsung dari masyarakat umum dalam pengambilan keputusan. Sistem otoriter seringkali dipilih oleh negara-negara baru merdeka yang menghadapi tantangan besar seperti konflik internal, ketidakstabilan ekonomi, atau ancaman disintegrasi. Pendukung sistem ini berargumen bahwa stabilitas dan kontrol yang ditawarkan oleh pemerintahan otoriter dapat menyediakan fondasi yang kuat untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.²⁶

Namun, transisi ke sistem demokrasi atau pemilihan untuk tetap dalam sistem otoriter tidaklah mudah dan seringkali dipenuhi dengan tantangan. Demokrasi memerlukan institusi yang kuat, budaya politik yang matang, serta kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat. Sementara itu, sistem otoriter, meskipun mungkin menawarkan stabilitas pada awalnya, sering kali berisiko mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan penindasan terhadap kebebasan individu. Pilihan antara demokrasi dan otoriter bagi negara yang baru merdeka seringkali tergantung pada konteks historis, kondisi sosial-ekonomi, dan aspirasi masyarakatnya.²⁷ Penting bagi suatu negara untuk menimbang dengan hati-hati kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem pemerintahan tersebut, dengan mempertimbangkan tujuan jangka panjang mereka untuk stabilitas, pertumbuhan, dan kesejahteraan rakyat. Kesuksesan implementasi sistem pemerintahan apapun sangat bergantung pada kemampuan negara untuk beradaptasi, berinovasi, dan memenuhi kebutuhan serta aspirasi rakyatnya.

Dalam mempertimbangkan sistem pemerintahan yang akan diterapkan, negara-negara baru merdeka juga harus memperhatikan dinamika internal dan tantangan eksternal yang dihadapi. Kestabilan politik, keamanan, dan pembangunan ekonomi adalah faktor-faktor penting yang perlu diperkuat untuk mendukung keberlanjutan negara.²⁸ Dalam konteks ini, pendekatan yang fleksibel dan adaptif terhadap model pemerintahan dapat menjadi kunci. Salah satu tantangan utama dalam membangun demokrasi adalah memastikan bahwa kebebasan dan hak-hak individu dilindungi sambil menjaga ketertiban dan keamanan nasional.²⁹ Negara-negara baru merdeka dengan latar belakang konflik atau perpecahan internal mungkin menemukan ini sebagai tantangan yang berat. Dalam hal ini, pendidikan politik dan kesadaran sosial menjadi vital dalam membentuk masyarakat yang matang secara politik,³⁰ yang dapat berpartisipasi secara konstruktif dalam proses demokrasi.

Di sisi lain, negara yang memilih jalur otoriter harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam siklus kekuasaan yang terpusat yang dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan. Meskipun kontrol yang ketat mungkin memberikan kesan stabilitas dan efisiensi dalam jangka

²⁵ Vineeta Tiwari and Ashish Dhoundiyal, "Democracy and Elections," *Supremo Amicus* 16 (2020): 333.

²⁶ Georg Sørensen, "Democracy, Authoritarianism and State Strength," *The European Journal of Development Research* 5, no. 1 (1993): 6–34.

²⁷ Suprisno Baderan, "Pola Transisi Demokrasi Yang Terjadi Di Indonesia Dan Brasil," *Farabi* 11, no. 2 (2014): 100–108.

²⁸ Lotfali Agheli and Vahid Mohamad Taghvaei, "Political Stability Effect on Environment and Weak Sustainability in Asian Countries," *Sustainability Analytics and Modeling* 2 (2022): 100007.

²⁹ Muhammad Zaki et al., "Sosialisme Demokratis Dalam Kebhinekaan Indonesia," *VISA: Journal of Vision and Ideas* 3, no. 3 (2023): 558–69.

³⁰ Arif Sugitanata and Muannif Ridwan, "Menuju Keluarga Yang Harmonis: Manajemen Konflik Politik Dalam Keluarga Di Tengah Perbedaan Pilihan Politik," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 4, no. 1 (2024): 67–74, <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/jipm/article/view/706>.

pendek, dalam jangka panjang, ini bisa mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat dan stagnasi ekonomi.³¹ Oleh karena itu, bahkan dalam sistem otoriter, penting untuk mencari keseimbangan antara kepemimpinan yang kuat dan keterlibatan masyarakat dalam beberapa aspek kehidupan publik.

Integrasi ekonomi global dan tekanan internasional juga memainkan peranan dalam menentukan sistem pemerintahan.³² Negara-negara baru merdeka seringkali berusaha untuk menarik investasi asing dan memperkuat hubungan diplomatik. Dalam konteks ini, citra internasional dan persepsi tentang legitimasi dan stabilitas pemerintahan bisa sangat mempengaruhi kemampuan negara untuk berintegrasi dengan sistem global. Akhirnya, pilihan antara demokrasi dan otoritarianisme bukanlah biner atau tetap; banyak negara memilih untuk mengadopsi elemen dari kedua sistem untuk menciptakan model pemerintahan hibrida yang sesuai dengan kebutuhan unik dan konteks mereka. Apapun pilihan sistem pemerintahan, esensial bagi negara-negara baru merdeka untuk terus berusaha mencapai keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan kebebasan individu, sambil mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial. Pertumbuhan dan stabilitas jangka panjang negara sangat bergantung pada kemampuannya untuk memelihara kohesi sosial, menghormati hak asasi manusia, dan menyesuaikan diri dengan dinamika global yang berubah.

Analisis Sistem Pemerintahan Demokrasi dan Otoriter dalam Negara-negara Baru Merdeka Melalui Lensa Teori Maqashid Syariah

Dalam menganalisis perbandingan antara sistem pemerintahan demokrasi dan otoriter dalam konteks negara-negara yang baru merdeka melalui lensa teori Maqashid Syariah, penting untuk memahami bahwa teori ini bertujuan untuk melindungi dan memenuhi lima aspek krusial kehidupan manusia: agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (maal).³³ Teori Maqashid Syariah, yang menekankan pada pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dasar manusia ini, dapat memberikan perspektif yang kaya dalam menganalisis sistem pemerintahan yang paling cocok untuk memenuhi tujuan tersebut.³⁴

Dalam konteks demokrasi, prinsip dasar yang menekankan kebebasan dan partisipasi aktif warganya dalam proses pengambilan keputusan secara intrinsik³⁵ sejalan dengan prinsip Maqashid Syariah dalam melindungi hak-hak asasi manusia (hifz al-hurriya) sebagai bagian dari perlindungan jiwa dan akal. Demokrasi juga memungkinkan untuk kebebasan beragama (hifz al-din) dan ekspresi, serta memperkuat fondasi keadilan sosial melalui partisipasi yang luas dalam membuat kebijakan yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Hal ini, pada gilirannya, mendukung perlindungan harta (hifz al-maal) dan keturunan (hifz al-nasl) melalui kebijakan yang adil dan inklusif.

Namun, teori Maqashid Syariah juga mengakui pentingnya stabilitas dan keamanan (hifz al-nafs) sebagai syarat untuk pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Dalam hal ini, sistem

³¹ Daniel Byman and Jennifer Lind, "Pyongyang's Survival Strategy: Tools of Authoritarian Control in North Korea," *International Security* 35, no. 1 (2010): 44–74.

³² Budi Winarno, "Globalisasi Dan Rezim Demokrasi Poliarki: Kebijakan Integrasi Ekonomi Indonesia," *Jurnal Hubungan Internasional* 3, no. 1 (2014): 1–12.

³³ Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul as-Syari'ah*, II (Beirut: Dar al-kutub al-Islamiyyah, 2003), 10.

³⁴ Aisyah Chairil and Arif Sugitanata, "MAQASHID ASY-SYARI'AH REVIEW ON FORMER CORRUPTION CONVICTS AS PROSPECTIVE LEGISLATIVE MEMBERS," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 19, no. 2 (2022): 299–323.

³⁵ Sørensen, "Democracy, Authoritarianism and State Strength."

otoriter dapat dilihat sebagai pilihan yang tepat bagi negara-negara yang menghadapi tantangan besar seperti konflik internal atau ketidakstabilan ekonomi, di mana kebutuhan untuk keamanan dan stabilitas menjadi prioritas.³⁶ Meski begitu, sistem ini seringkali berisiko mengorbankan kebebasan individu dan keadilan sosial, yang dapat menimbulkan pertanyaan serius mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam jangka panjang.

Mengingat Maqashid Syariah menekankan pada keseimbangan dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, transisi dari sistem otoriter ke demokrasi atau integrasi unsur-unsur keduanya dalam sistem hibrida dapat dilihat sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan akan stabilitas dan kebebasan, keadilan sosial, dan partisipasi masyarakat. Kunci dari transisi atau integrasi ini terletak pada kemampuan negara untuk membangun institusi yang kuat, meningkatkan kesadaran politik dan sosial masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi.

Pentingnya pendidikan politik dan kesadaran sosial tidak bisa diremehkan dalam konteks ini.³⁷ Pendidikan dan kesadaran yang meningkat dapat membantu membangun masyarakat yang matang secara politik, yang tidak hanya berpartisipasi dalam pemilihan umum tetapi juga dalam pembuatan kebijakan publik dan pengawasan pemerintah.³⁸ Hal ini selaras dengan prinsip Maqashid Syariah dalam melindungi akal (*hifz al-aql*) dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diimplementasikan memenuhi kebutuhan dasar manusia secara adil dan inklusif.

Selain itu, adaptasi dan inovasi dalam pemerintahan menjadi sangat penting.³⁹ Negara-negara baru merdeka harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika global yang berubah dan menemukan cara-cara baru untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi rakyatnya dalam kerangka yang sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Ini termasuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat, melindungi hak asasi manusia, dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah mendukung pertumbuhan dan stabilitas jangka panjang.⁴⁰

Dalam konteks Maqashid Syariah, integrasi ekonomi global dan pembangunan ekonomi berkelanjutan juga menonjol sebagai aspek penting yang perlu diperhatikan. Pertumbuhan ekonomi harus diupayakan agar dapat memenuhi kebutuhan harta (*hifz al-maal*) dan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dalam sistem demokrasi, kebijakan ekonomi dan sosial yang inklusif dapat mendukung prinsip ini dengan memastikan bahwa semua individu memiliki akses ke sumber daya dan peluang untuk berkembang. Di sisi lain, dalam sistem otoriter, tantangannya adalah memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang tetapi juga memberi manfaat kepada masyarakat luas, sejalan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam Maqashid Syariah.

Oleh karena itu, ketika negara-negara yang baru merdeka mempertimbangkan sistem pemerintahan yang akan diadopsi atau dikembangkan, sangat penting untuk memperhatikan

³⁶ Sørensen.

³⁷ Arif Sugitanata and Muannif Ridwan, "Menuju Keluarga Yang Harmonis: Manajemen Konflik Politik Dalam Keluarga Di Tengah Perbedaan Pilihan Politik."

³⁸ Arif Sugitanata, "DINAMIKA KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN," *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2023): 127–46.

³⁹ Ukadike and Arisi, "Good Governance: A Panacea for Peace and Stability in Nigeria Nation."

⁴⁰ Agheli and Taghvaei, "Political Stability Effect on Environment and Weak Sustainability in Asian Countries."

bagaimana setiap sistem dapat membantu atau menghambat pencapaian tujuan-tujuan Maqashid Syariah. Hal ini tidak hanya terbatas pada pemilihan sistem pemerintahan tetapi juga bagaimana sistem tersebut diimplementasikan dalam praktik. Implementasi yang berhasil memerlukan pemikiran yang mendalam tentang bagaimana kebijakan dan lembaga pemerintah dapat dirancang dan dioperasikan untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia secara adil dan inklusif. Akhirnya, dalam memilih dan mengimplementasikan sistem pemerintahan, negara-negara baru merdeka harus berusaha untuk menciptakan lingkungan politik, ekonomi, dan sosial yang dinamis, di mana keseimbangan antara kekuasaan dan kebebasan, keadilan dan efisiensi, stabilitas dan adaptabilitas, dapat dicapai dan dipertahankan. Proses ini tidak mudah dan penuh dengan tantangan, tetapi dengan pendekatan yang terinformasi dan sensitif terhadap konteks serta kebutuhan masyarakat, negara dapat mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, penelitian ini mengupas perbandingan antara sistem pemerintahan demokrasi dan otoriter dalam konteks negara-negara yang baru merdeka, dengan menilai kedua sistem tersebut melalui lensa teori Maqashid Syariah. Teori ini bertujuan untuk melindungi lima aspek krusial kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dari perspektif ini, demokrasi seringkali dianggap sejalan dengan Maqashid Syariah karena menekankan kebebasan, partisipasi masyarakat, dan keadilan sosial, yang mendukung perlindungan hak-hak asasi manusia termasuk kebebasan beragama dan ekspresi. Namun, teori ini juga mengakui pentingnya stabilitas dan keamanan, yang bisa diberikan oleh sistem otoriter di negara dengan tantangan besar seperti konflik atau ketidakstabilan ekonomi, meskipun berisiko mengorbankan kebebasan individu dan keadilan sosial dalam jangka panjang. Mengingat pentingnya keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia, penelitian ini menyarankan bahwa transisi dari otoritarianisme ke demokrasi atau pengintegrasian elemen dari kedua sistem dalam model hibrida bisa menjadi strategi untuk mencapai stabilitas, kebebasan, dan keadilan sosial. Hal ini memerlukan pembangunan institusi yang kuat, peningkatan kesadaran politik dan sosial, serta partisipasi masyarakat yang aktif. Pendidikan politik dan kesadaran sosial ditekankan sebagai kunci untuk membangun masyarakat yang matang secara politik dan berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan pemerintah. Selain itu, adaptasi, inovasi dalam pemerintahan, dan integrasi ekonomi global yang sejalan dengan Maqashid Syariah dianggap penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kesimpulannya, dalam memilih dan mengimplementasikan sistem pemerintahan, negara-negara baru merdeka harus mempertimbangkan bagaimana sistem tersebut dapat mendukung pencapaian tujuan-tujuan Maqashid Syariah, termasuk keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan kebebasan individu, serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial yang berkelanjutan. Implementasi yang berhasil dari sistem pemerintahan memerlukan pendekatan yang terinformasi dan sensitif terhadap kebutuhan dan konteks masyarakat, mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Daftar Pustaka

A Salman Maggalatung. "Indonesia Negara Hukum Demokratis Bukan Negara Kekuasaan Otoriter." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 2, no. 2 (2015): 209–20.

- Abi-Saab, Georges M. "The Newly Independent States and the Rules of International Law: An Outline." *Howard LJ* 8, no. 1 (1962): 95.
- Agheli, Lotfali, and Vahid Mohamad Taghvaei. "Political Stability Effect on Environment and Weak Sustainability in Asian Countries." *Sustainability Analytics and Modeling* 2 (2022): 100007.
- Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi. *Al-Muwafaqat Fi Ushul as-Syari'ah*. II. Beirut: Dar al-kutub al-Islamiyyah, 2003.
- Arif Sugitanata and Muannif Ridwan. "Menuju Keluarga Yang Harmonis: Manajemen Konflik Politik Dalam Keluarga Di Tengah Perbedaan Pilihan Politik." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 4, no. 1 (2024): 67–74. <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/jipm/article/view/706>.
- Armakolas, Ioannis, Agon Demjaha, Arolda Elbasani, Stephanie Schwandner-Sievers, Elton Skendaj, and Nikolaos Tzifakis. "State-Building in Post-Independence Kosovo: Policy Challenges and Societal Considerations." *Ioannis Armakolas, Agon Demjaha, Arolda Elbasani, Stephanie Schwandner-Sievers, Elton Skendaj and Nikolaos Tzifakis (2017). (Eds), State-Building in Post-Independence Kosovo: Policy Challenges and Societal Considerations, Pristina: Kosovo Foundation for Open Society, 2017, 423.*
- Arthur, Peter. "Democratic Consolidation in Ghana: The Role and Contribution of the Media, Civil Society and State Institutions." *Commonwealth & Comparative Politics* 48, no. 2 (2010): 203–26.
- Baderan, Suprisno. "Pola Transisi Demokrasi Yang Terjadi Di Indonesia Dan Brasil." *Farabi* 11, no. 2 (2014): 100–108.
- Basri, Muhammad, Bagus Surodipo, Nur Fadillah, and Nursyamsiah Simbolon. "Penjajahan Barat Atas Dunia Islam Dan Perjuangan Kemerdekaan Negara-Negara Islam." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2024): 19–24.
- Byman, Daniel, and Jennifer Lind. "Pyongyang's Survival Strategy: Tools of Authoritarian Control in North Korea." *International Security* 35, no. 1 (2010): 44–74.
- Chairil, Aisyah, and Arif Sugitanata. "MAQASHID ASY-SYARI'AH REVIEW ON FORMER CORRUPTION CONVICTS AS PROSPECTIVE LEGISLATIVE MEMBERS." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 19, no. 2 (2022): 299–323.
- Cotton, James. "From Authoritarianism to Democracy in South Korea." *Political Studies* 37, no. 2 (1989): 244–59.
- Dewi, Elvia Puspa. "Good Governance Dan Transparansi Rencana Strategi Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah." *Jurnal Lentera Bisnis* 7, no. 2 (2018): 81–108.
- Fadiyah, Dina, and Antonius Jeremias Beso. "Perbandingan Partisipasi Politik Di Negara Demokrasi Dan Negara Otoriter." *JURNAL POLINTER: KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL* 4, no. 1 (2018): 37–42.
- Gafar, Badmus Bidemi. "The Travail of Service Delivery and Developmental Failure in Post-Independence Nigeria." *Journal of Public Administration and Policy Research* 9, no. 3 (2017): 26–33.
- Guibernau, Montserrat. "National Identity, Devolution and Secession in Canada, Britain and Spain." *Nations and Nationalism* 12, no. 1 (2006): 51–76.
- Hasibuan, Syaiful Asmi. "Sistem Pemilihan Umum Dalam Kaitan Dengan Negara Demokrasi." *Warta Dharmawangsa* 17, no. 2 (2023): 602–9.
- Marsh, Robert M. "Authoritarian and Democratic Transitions in National Political Systems." *International Journal of Comparative Sociology* 32, no. 3 (1991): 219.

- Mbaku, John Mukum. "Post-Independence Opportunism and Democratization in Africa." *The Journal of Social, Political, and Economic Studies* 20, no. 4 (1995): 405.
- Mohamad Rosyidin. "Dari Otoritarianisme Ke Demokrasi: Bagaimana Mendorong Negara Menuju Kestabilan Dan Keterbukaan?" *Jurnal Penelitian Politik* Volume 10, no. 1 (2013): 155–60.
- Prasetyo, Eko, and Arif Sugitanata. "Urgensi Penerapan Good Governance Berbasis Kearifan Lokal Di Indonesia." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2022): 67–90.
- Royani, Ahmad. "Pesantren Dalam Bingkai Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia." *Jurnal Islam Nusantara* 2, no. 1 (2020): 121–28.
- Sahin, Selver B. "Timor-Leste's Foreign Policy: Securing State Identity in the Post-Independence Period." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 33, no. 2 (2014): 3–25.
- Santoso, Gunawan, Aim Abdul Karim, and Bunyamin Maftuh. "Kajian Ketahanan Nasional Melalui Geopolitik Dan Geostrategi Indonesia Abad 21." *Jurnal Pendidikan Transformatif* 2, no. 1 (2023): 184–96.
- Sibanda, Sanele. "Not Purpose-Made! Transformative Constitutionalism, Post-Independence Constitutionalism and the Struggle to Eradicate Poverty." *Stellenbosch Law Review* 22, no. 3 (2011): 482–500.
- Sørensen, Georg. "Democracy, Authoritarianism and State Strength." *The European Journal of Development Research* 5, no. 1 (1993): 6–34.
- Stiglitz, Joseph, José Antonio Ocampo, Shari Spiegel, Ricardo Ffrench-Davis, and Deepak Nayyar. *Stability with Growth: Macroeconomics, Liberalization and Development*. New York: OUP Oxford, 2006.
- Sugitanata, Arif. "DINAMIKA KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2023): 127–46.
- Susanto, Heri. "Kolonialisme Dan Identitas Kebangsaan Negara-Negara Asia Tenggara." *Jurnal Sejarah Dan Budaya* 10, no. 2 (2016): 144–55.
- Svolik, Milan W. "Power Sharing and Leadership Dynamics in Authoritarian Regimes." *American Journal of Political Science* 53, no. 2 (2009): 477–94.
- Tasnur, Irvan, and Muhammad Rijal Fadli. "Republik Indonesia Serikat: Tinjauan Historis Hubungan Kausalitas Peristiwa-Peristiwa Pasca Kemerdekaan Terhadap Pembentukan Negara RIS (1945-1949)." *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah* 5, no. 2 (2019): 58–67.
- Tiwari, Vineeta, and Ashish Dhoundiyal. "Democracy and Elections." *Supremo Amicus* 16 (2020): 333.
- Ukadike, OJ, and RO Arisi. "Good Governance: A Panacea for Peace and Stability in Nigeria Nation." *Public Policy and Administration Research* 3, no. 4 (2013): 121.
- Winarno, Budi. "Globalisasi Dan Rezim Demokrasi Poliarki: Kebijakan Integrasi Ekonomi Indonesia." *Jurnal Hubungan Internasional* 3, no. 1 (2014): 1–12.
- Zaki, Muhammad, Daffa Rifqi Rafsanjani, Denis Andryan Hutabarat, Bima Hidayah, and Denny Oktavina Radianto. "Sosialisme Demokratis Dalam Kebhinekaan Indonesia." *VISA: Journal of Vision and Ideas* 3, no. 3 (2023): 558–69.